

Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Peran DP3AKB) Pada Program Pencegahan Stunting Di Desa Tanjungharjo

Implementation Of Public Health Policies (The Role Of DP3AKB) In The Stunting Prevention Program In Tanjungharjo Village

Audhy Sindhy Kusumawardani¹ · Prasetyo Isbandono²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email: audhy.20073@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email: prasetyoisbandono@unesa.ac.id

Abstrak

Program Pencegahan Stunting Studi Desa Tanjungharjo bertujuan untuk mencegah adanya stunting pada Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan peran DP3AKB pada Peraturan Bupati Nomer 188/191/KEP/412.013/2022-2024 berisi tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2022-2024. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode purposif sampling. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Peneliti ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Peran DP3AKB) Pada Program Pencegahan Stunting di Desa Tanjungharjo. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang memiliki empat indikator yaitu Komunikasi yang meliputi transmisi, konsistensi, kejelasan yang mana petugas mengadakan sosialisasi yang di lakukan minimal satu bulan sekali yang bertempat di balai desa. Petugas memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa itu stunting, bahaya stunting, cara mencegah stunting, Sumberdaya yang di maksud disini tersedianya fasilitas fisik yang meliputi timbangan berat badan untuk bayi dan balita dan tenaga ahli yaitu bidan untuk menunjang program pencegahan stunting pada Desa Tanjungharjo berjalan dengan baik, Disposisi sendiri memiliki peran pendekatan pelaksana kepada masyarakat dengan tidak membedakan – bedakan masyarakat dan memberikan pelayanan pendampingan pada keluarga yang termasuk menjadi target petugas dalam menjalankan program pencegahan stunting, Struktur Birokrasi terkait dengan SOP atau aturan yang di berikan bupati dalam program pencegahan stunting. pada SOP ini masyarakat di layani petugas dengan baik secara terkoordinasi dan berjalan kondusif. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Peran DP3AKB) Pada Program Pencegahan Stunting Studi Desa Tanjungharjo berjalan dengan baik serta sudah sesuai arahan SK (Surat Keputusan) Bupati Nomer 188/191/KEP/412.013/2022-2024 berisi tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2022-2024.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Stunting

Abstract

The Tanjungharjo Village Study Stunting Prevention Program aims to prevent stunting in Bojonegoro Regency. The aim of this research is to describe the implementation of the DP3AKB role policy in Regent Regulation Number 188/191/KEP/412.013/2022-2024 containing the Stunting Reduction Acceleration Team in 2022-2024. This research uses qualitative descriptive research with a purposive sampling method. Data collected using interview techniques, observation, documentation. This research focuses on the Implementation of Public Health Policy (The Role of DP3AKB) in the Stunting Prevention Program in Tanjungharjo Village. This research uses Edward III's theory which has four indicators, namely communication which includes transmission, consistency and clarity, where officers hold socialization which is carried out at least once a month at the village hall. Officers provide information to the public about what stunting is, the dangers of stunting, how to prevent stunting. The resources referred to here are the availability of physical facilities which include weight scales for babies and toddlers and experts, namely midwives, to support the stunting prevention program in Tanjungharjo Village running well. , Disposition itself has the role of an implementing approach to the community by not discriminating between communities and providing assistance services to families who are among the targets of officers in carrying out stunting prevention programs, Bureaucratic Structure related to SOPs or rules given by the regent in the stunting prevention program. In this SOP, the community is served by officers well in a coordinated and conducive manner. It can be concluded that the Implementation of Public Health Policy (The Role of DP3AKB) in the Tanjungharjo Village Study Stunting Prevention Program is going well and is in accordance with the direction of the Regent's Decree Number 188/191/KEP/412.013/2022-2024 containing the Team for Accelerating Stunting Reduction in 2022-2024.

Keywords: Implementation, Program, Stunting

Pendahuluan

Implementasi adalah tahap dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan menjadi fase penting karena menentukan keberhasilan kebijakan itu sendiri. Untuk mencapai generasi emas, Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, saat ini Indonesiamasih menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, gizi buruk, dan kesehatan, salah satunya adalah stunting. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan tinggi badan yang di bawah standar (WHO, 2015). Kemenkes menambahkan bahwa stunting adalah kegagalan pertumbuhan pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (Oktia Woro Kasmini Handayani, 2018). BKKBN menyatakan bahwa stunting adalah kondisi di mana bayi mengalami kekurangan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak dan pertumbuhan anak (BKKBN, 2020). Balita yang mengalami stunting cenderung lebih pendek dibandingkan balita seumurannya, namun tidak semua anak yang pendek mengalami stunting (BKKBN, 2020). Penyebab utama stunting adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan ibu serta calon ibu

dalam mencegah stunting pada balita mereka.

Balita, anak berusia antara 1 sampai 3 tahun, dikategorikan stunting jika tinggi badannya kurang dari minus dua standar median pertumbuhan anak (WHO, 2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting meliputi status gizi ibu saat hamil, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, kondisi kesehatan bayi, dan asupan gizi bayi (Oktia Woro Kasmini Handayani, 2018). BKKBN menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan stunting karena berdampak pada potensi sumber daya manusia dan kesehatan anak (Hafzana Bedasari, 2021).

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, sesuai dengan amanat Presiden Jokowi pada tahun 2021 (BKKBN, 2020). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai target ini. Di Kabupaten Bojonegoro, terdapat 15 desa di beberapa kecamatan dengan tingkat stunting tertinggi selama tiga tahun terakhir, menunjukkan variasi faktor penyebab stunting di setiap kecamatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, 2020). Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami penyebab stunting di Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendekatkan layanan percepatan penurunan stunting, dibentuk TPPS kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat. TPPS bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. TPPS desa/kelurahan dikoordinasikan oleh ketua Tim Penggerak PKK dan fokus pada pendampingan dan pengawasan perencanaan dana desa untuk percepatan penurunan stunting.

DP3AKB Kabupaten Bojonegoro mengimplementasikan peran mereka melalui penguatan peran PKK, bidan, kader, dan sistem deteksi dini di Kecamatan Kapas desa Tanjungharjo. Setiap desa diharapkan memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, PKK, dan kader yang memenuhi kualifikasi. DP3AKB juga menggunakan aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) untuk membantu petugas mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan memastikan implementasi program yang lebih baik dan terarah. Selain SIGA, ada juga ELSIMIL (Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) untuk menekan angka stunting di kalangan calon pengantin. Aksi nasional ini bertujuan memastikan bahwa keluarga berisiko stunting mendapatkan informasi, layanan kesehatan, dan bantuan program sosial.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian metode menggunakan kualitatif purposif sampling, karena penelitian ini bertujuan mengetahui peran DP3AKB dalam implementasi kebijakan Stunting di Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kapas Desa Tanjungharjo. Metode pengumpulan data yaitu Metode Observasi dan Metode Wawancara dengan lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kantor DP3AKB Kecamatan Kapas dan masyarakat Desa Tanjungharjo, Bojonegoro. Selain itu jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung kepada pengumpul data dan data sekunder secara tidak langsung diperoleh pengumpul data dari buku yang dimiliki oleh pegawai DP3AKB yaitu Pedoman Mekanisme Operasional Penggerakan Dalam Percepatan

Penurunan Angka Stunting di Lini Lapangan. Fokus penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teori dari Edward III dengan empat indikator yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bersama Koordinator DP3AKB Kecamatan Kapas dan stafnya. Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, nomor 188/191/KEP/412.013/2022-2024, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mengurangi kasus stunting di Bojonegoro. BKKBN pusat meluncurkan aplikasi SIGA dan ELSIMIL untuk memantau stunting melalui smartphone. Aplikasi SIGA membantu pengambilan keputusan berbasis data, sementara ELSIMIL fokus pada calon pengantin dan ibu hamil untuk mencegah stunting. TPPS mengoordinasikan dan mengevaluasi program penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan. Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB, melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, bantuan sosial, dan pengawasan faktor risiko stunting. Di Desa Tanjungharjo, DP3AKB memantau stunting melalui aplikasi SIGA dan ELSIMIL serta membentuk TPK untuk pendampingan dan pencegahan stunting. Sosialisasi oleh DP3AKB melibatkan berbagai kelompok usia dan membahas pencegahan stunting sejak dini, termasuk pemberian tablet penambah darah untuk remaja.

Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi efektif adalah kunci implementasi kebijakan publik yang sukses. Implementasi yang berhasil terjadi ketika pembuat keputusan memahami dengan baik apa yang mereka lakukan. Informasi yang dipahami oleh pengambil keputusan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Berdasarkan wawancara, tindakan petugas dalam kasus stunting melibatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama remaja, ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita. Hambatan yang dihadapi petugas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi. Untuk mengatasi hal ini, petugas melakukan pendekatan langsung ke masyarakat untuk menjelaskan tentang stunting dan bahayanya. Sesuai dengan indikator dari Edward III yaitu transmisi yaitu penyaluran informasi yang baik serta diikuti dengan kejelasan yang mana informasi yang berikan harus jelas agar masyarakat memahami apa yang di sampaikan oleh petugas, selain transmisi dan kejelasan petugas juga melakukan konsistensi yaitu perintah yang di berikan harus konsisten tidak berubah agar masyarakat tidak bingung apa yang disampaikan oleh petugas. Berdasarkan wawancara, masyarakat menilai tindakan petugas sudah memenuhi kebutuhan mereka. Petugas memberikan banyak informasi tentang

stunting dengan menggunakan gambar untuk memudahkan pemahaman. Hambatan yang ditemukan adalah kurang jelasnya petugas dalam menjelaskan asupan gizi. Untuk mengatasi hambatan ini, petugas melakukan pendekatan langsung dengan berbicara face to face. Sesuai dengan indikator dari Edward III yaitu transmisi yaitu penyaluran informasi yang baik serta diikuti dengan kejelasan yang mana informasi yang diberikan harus jelas agar masyarakat memahami apa yang di sampaikan oleh petugas, selain transmisi dan kejelasan petugas juga melakukan konsistensi yaitu perintah yang di berikan harus konsisten tidak berubah agar masyarakat tidak bingung apa yang disampaikan oleh petugas.

2. Sumber Daya

Kebijakan sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Di Kecamatan Kapas, sumber daya sudah cukup, termasuk staf pelaksana dan fasilitas yang mendukung peran DP3AKB dalam pencegahan stunting. Program pencegahan stunting di Desa Tanjungharjo melibatkan TPK yang terdiri dari bidan, kader TP PKK, dan kader KB. Petugas DP3AKB dan kader TPK mendata dan mendampingi masyarakat serta menyediakan vitamin penambah darah dan papan informasi tentang stunting. Edward III sumberdaya yang termasuk sumberdaya fasilitas dan sumberdaya manusianya serta sumberdaya anggaran dari APBN yang merupakan faktor untuk mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Masyarakat menilai peran petugas dalam pencegahan stunting sudah baik. Fasilitas fisik seperti timbangan berat badan, tensi, dan obat penambah darah tersedia. Petugas DP3AKB dan kader TPK mengadakan posyandu dan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat. Masyarakat puas dengan peranan petugas dan tersedianya tenaga ahli yang mencukupi. sesuai dengan teori Edward III yang membahas tentang sumberdaya fasilitas yang merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, penilaian dari masyarakat juga merasakan petugas seperti ngemong masyarakat dengan menyarankan untuk rajin- rajin mengecek kandungan serta tidak lupa untuk mengingatkan mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan harapan kandungan, balita terhindar dari kasus resiko stunting.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Petugas DP3AKB dan TPK menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan program pencegahan stunting. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan juknis yang diterima dan memberikan pelayanan yang ramah serta tanggap. Hambatan yang ditemukan adalah sikap bidan yang kurang ramah dalam melayani masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, petugas mengadakan musyawarah dan tanya jawab dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Edward III mengenai disposisi dalam birokrasi, di mana terdapat indikator pengangkatan birokrasi yang bertanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat. Masyarakat menilai petugas DP3AKB dan kader TPK sudah melayani dengan baik dan ramah. Hambatan yang ditemukan adalah sikap bidan yang kurang ramah. Untuk mengatasi hambatan ini, petugas mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dan tanya jawab. Hal tersebut sesuai dengan teori Edward III mengenai disposisi dalam birokrasi

dengan melayani masyarakat dengan ramah dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka sebagai sektor pelayanan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik adalah kunci dalam implementasi kebijakan. Di Desa Tanjungharjo, SOP yang digunakan adalah SOP dari DP3AKB pusat. Program pencegahan stunting berjalan dengan baik dan terkoordinasi, mulai dari peran petugas DP3AKB dan TPK hingga pelaporan pada aplikasi SIGA dan ELSIMIL. Koordinasi yang baik antara petugas dan masyarakat memastikan keberhasilan program. Hal ini sesuai dengan teori Edward III tentang struktur birokrasi, di mana terdapat indikator seperti Prosedur Operasional Standar (SOP) dan Fragmentasi. Dalam struktur ini, tanggungjawab untuk berbagai aktivitas dan kegiatan tersebar di unit-unit kerja yang sesuai dengan fragmentasi struktur birokrasi tersebut. Masyarakat menilai SOP yang digunakan petugas sudah baik dan program pencegahan stunting berjalan dengan baik. Pelayanan yang diberikan petugas mulai dari pencatatan data hingga pelayanan KB gratis sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesimpulannya, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik antara petugas DP3AKB, TPK, dan masyarakat memastikan keberhasilan program pencegahan stunting di Desa Tanjungharjo. yang mereka jalani dan tergolong berjalan dengan kondusif. Sesuai dengan konsep dalam teori Edward III yang mengedepankan pentingnya SOP.

Penutup

Program Pencegahan Stunting yang ada pada Bojonegoro ini merupakan program yang turun dari Bapak Presiden Jokowi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Pada Nomer 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting serta pada Kabupateb Bojonegoro dengan Surat Perintah dari Bupati Anna Muawannah tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro Pada Nomer 188/191/KEP/412.013/2022-2024. Pelaksana yang melaksanakan dari Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Peran DP3AKB) Pada Program Pencegahan Stunting Studi Desa Tanjungharjo ini meliputi Penyuluh KB dari DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yang di tugaskan pada wilayah Kecamatan Kapas, TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) serta TPK (Tim Pendamping Keluarga).

Berdasarkan variabel pertama yaitu Komunikasi, komunikasi pada sisi petugas DP3AKB dan Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan petugas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu stunting, pencegahan stunting. Untuk hambatan yang ditemukan disini masih adanya masyarakat yang susah untuk mengikuti sosialisasi yang di adakan. Hambatan lainnya dari penilaian masyarakat bahwakurang detailnya petugas dalam menjelaskan gizi apa yang harus di butuhkan secara urgent untuk mencegah stunting. Pada hambatan yang terjadi petugas menanganinya dengan datang kerumah masyarakat menjadi target program pencegahan stunting. Dengan angel dari masyarakat sendiri menemukan kepuasan masyarakat terhadap apa yang dilakukan petugas seperti tindakan dari petugas, dan menangani hambatan yang terjadi saat berjalannya program pencegahan stunting.

Variable kedua yaitu Sumberdaya, adanya sumberdaya yang baik akan membantu program pencegahan stunting ini berjalan dengan baik. Dari sisi petugas DP3AKB dan kader TPK terlihat bahwa petugas DP3AKB memantau langsung pada lapangan dengan datang saat sosialisasi dan posyandu di adakan. Dari petugas TPK sendiri berperan aktif pada program pencegahan stunting dengan tugas bidan melaporkan apa yang terjadi di lapangan sesuai catatan yang di berikan kader ke puskesmas, puskesmas melakukan penyuluhan yang di bantu oleh petugas DP3AKB. Peran petugas disini mendampingi dan melakukan penyuluhan kepada target program pencegahan stunting. Dari ketersediaan tenaga ahli dan fasilitas sudah mencukupi. Tersedianya tenaga ahli serta tupoksi, pembekalan ilmu memberikan petugas mudah dalam menjalankan program. Untuk meningkatkan berjalannya program ini petugasmengadakan Minilokakarya DP3AKB yang merupakan salah satu bentuk upaya pemantauan berbagai lintas program dan memantau pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan dan memecahkan masalah yang di hadapi serta tersusunnya rencana kerja baru. Dari sisi masyarakat yang memiliki bayi baru lahir (ibu pasca salin) menilai bahwa peranan petugas DP3AKB dan Kader TPK sudah baik karna petugas berusaha mendekati diri kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan adanya peranan petugas DPAKB dan kader TPK serta antusias masyarakat sangat membantu proses implementasi kebijakan program pencegahan stunting sesuai SK (Surat Keputusan) yang di turun dari Bupati Bojonegoro.

Variable ketiga yaitu Disposisi sikap kedekatan agen pelaksana. Sikap agen pelaksana kegiatan Implementasi Kebijakan Pencegahan Kesehatan Masyarakat dalam peran DP3AKB pada program Pencegahan Stunting di Desa Tnjungharjo dari sudut petugas DP3AKB dan Kader TPK sudah bertanggung jawab akan tugasnya karna tanggung jawab pada program ini bukan hanya tanggung jawab dari personal saja tetapi tanggung jawab seluruh pihak – pihak yang terlibat. Untuk komitmen yang di berikan petugas untuk masyarakat juga baik, tugas agen pelaksana paham akan apa yang menjadi tugasnya dalam mendampingi dan melayani masyarakat. Petugas tidak menghadapi hambatan yang signifikan salah satu kendala adalah penilaian masyarakat bahwa bidan kurang ramah dalam berinteraksi dengan mereka. Karena program ini sifatnya dari atas ke bawah, yaitu maksudnya program ini dari atasan yaitu bupati untuk di laksanakan oleh bawah yaitu petugas DP3AKB dan Kader TPK jadi kita sebagai bawahan menjalankan apa yang di perintahkan. Bisa di simpulkan bahwa petugas dan masyarakat merespon baik dari adanya program pencegahan stunting yang ada di Bojonegoro.

Variable keempat yaitu Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi merupakan prosedur standar kebijakan SOP untuk mengatur sumberdaya yang merupakan memiliki pengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan program pencegahan stunting. Berdasarkan hasil wawancara dan penelian yang dilakukan oleh peneliti yaitu petugas melakukan tugas sudah sesuai SOP. Peran DP3AKB pada program pencegahan stunting ini sebagai sektor membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk SOP yang di gunakan pada program ini mengikuti SOP yang digunakan DP3AKB pemerintah pusat dalam pencegahan stunting dengan melakukan persiapan, menentukan sasaran,

pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pembuatan laporan.

Berdasarkan hasil uraian tentang Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Peran DP3AKB) Pada Program Pencegahan Stunting Studi Desa Tanjungharjo dimana di dalam implementasinya ada beberapa yang harus di perbaiki dan perlu di tingkatkan. Adapun saran yang diajukan peneliti untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Peran DP3AKB) Pada Program Pencegahan Stunting Studi Desa Tanjungharjo adalah sebagai berikut:

1. Pihak TPK (Tim Pendamping Stunting), terutama bidan, sebaiknya lebih mendekatkan diri dan bersikap ramah kepada masyarakat agar mereka tidak ragu untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti terkait program pencegahan stunting.
2. Petugas perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci selama sosialisasi tentang jenis gizi yang diperlukan oleh bayi dan balita untuk mencegah kasus stunting di Desa Tanjungharjo.
3. Mempertahankan kedekatan petugas DP3AKB dan masyarakat agar masyarakat leluasa dalam bertanya seputaran program stunting pada Desa Tanjungharjo dan program ini berjalan seperti apa yang di harapkan.

Referensi

- Ayudia Andini , Irna Diyana Kartika, Berry Erida Hasbi , Muh Alfian Jafar, Z. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Pemanfaatan Daun Kelor Terhadap Upaya Pencegahan Stunting Pada Anak Usia 6 Bulan–2 Tahun di Puskesmas *Innovative: Journal Of ...*, 4, 5005–5016.
- BKKBN. (2020). *Cegah Stunting*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stuntingantisipasisgenerasi-stunting-guna-mencapai-indonesia-emas2045/0/artikel_gpr
- Bojonegoro, B. (2022). *SK_NO_191_TTG_tim_percepatan_penurunan_stunting_00.pdf* (p. 15).
- Bunker, D. R. (2010). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB*. 1(1), 1–11.
- Dr. Joko Pramono, S.Sos., M. S. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia* (A. D. Murdani (ed.)). Unisri Press, 2022.
- Dr. Umar Sidiq, M. A., & Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan* (M. A. Dr. Anwar Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya.
- Hafzana Bedasari, Frinda Novita, Azmi, Roli Sambuardi, P. S. (2021). Implementasi Kebijakan Cegah Stunting Di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun. *Jurnal Awam*, 1(2), 45–50.
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.

<https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>

- Hasanah, H. (2016). *Teknik-teknik observasi*. 8, 21–46.
- Imronah. (2010). Prespektif, Model dan Kriteria Pengukuran. *Implementasi Kebijakan*.
- Indah, Tjitjik, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Irfan Islamy, M. (2018). *Kebijakan Publik (2/3SKS/MOD)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Jenifer Aprilia Enjaurau, Ismail Sumampou, G. U. (2021). Jurnal governance. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng*, 1(2), 1–12.
- Leo Agustino, P. D. (2016). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Margawati, A., & Astuti, A. M. (2018). *Pengetahuan ibu , pola makan dan status gizi pada anak stunting usia 1-5 tahun di Kelurahan Bangetayu , Kecamatan Genuk , Semarang*. 6(2), 82–89.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja) Anggota IKAPI No.003/LPU/2013.
- Muhadjir, P. D. H. N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin.
- Oktia Woro Kasmini Handayani, Sri Ratna Rahayu , Efa Nugroho , Bertakalswa Hermawati , Nguyen Thi Vu, N. H. L. (2018). *Jurnal Kesehatan Masyarakat. Effectiveness Leadership And Optimalization Of Local*, 13(3), 423–429.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/kemas.v13i3.13593>
- Puwanto, M. Y. (2023). *Balita Stunting di Bojonegoro, Kasus Balita Stunting Di Bojonegoro*. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711324447/tercatat-2027-balita-stunting>.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Risnah, Bunga Lestari, Eny Sutria, M. I. (2021). *Pola Pemberian Makan Pada Balita Stunting Berdasarkan Teori Transcultural Nursing : Literature Review*. 4(1), 36–45.
- Sos, J. P. S., & Si, M. (2020). *Evaluasi, Implementasi Kebijakan Publik* (M. P. Dr. Sutoyo (ed.)). UNISRI Press.
- Stunting, P. P. tentang P. (2021). *Percepatan Penurunan Stunting* (Issue 1).
- Sugiyono. (2019). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- Thoha, M. (2002). *Dimensi- Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* (Ed. 1; Cet). Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ty Beal, A. T. L. M. N. A. S. D. I. (2018). *A review of child stunting determinants in Indonesia. March*, 1–10. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- Yogyakarta, D. S. (2019). *Kenali Penyebab Stunting Anak*. <https://sardjito.co.id/2019/07/22/kenali-penyebab-stunting-anak/>.